

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Representasi merupakan hakikat dari proses demokrasi, dengan adanya pihak terwakili dan wakil dalam segala proses politik terutama dalam bidang legislatif menjadi praktis dan efektif.<sup>1</sup> Dalam negara demokrasi, pemerintahan dijalankan atas persetujuan rakyat, rakyat memilih anggota legislatif dan pemimpin eksekutif secara langsung melalui pemilihan umum. Legitimasi pemerintahan bergantung pada persetujuan dan keputusan rakyat. Rakyatlah yang paling berhak dan paling mengetahui siapa yang layak menjadi pemimpin negara. Oleh karena itu, sebuah negara dianggap demokrasi jika dia memiliki pemilihan umum yang berkala, bebas, adil, dan kompetitif. Mereka harus memenuhi komitmen dan janji mereka selama kampanye.<sup>2</sup> Lembaga legislatif merupakan lembaga politik strategis karena mengemban tugas dan fungsi pokok untuk menyusun kebijakan<sup>3</sup>

Perwujudan keterwakilan perempuan pada lembaga politik berawal sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik dimulai dari Pasal 2 ayat (2): Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Hal tersebut merupakan salah satu inisiatif negara untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dengan memberikan

---

<sup>1</sup> Anis Maryuni Ardi, 2014, "*Perempuan Di Legislatif: Advokasi Perempuan Legislatif Bagi Kepentingan Dapil Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur*", Jurnal Politik Muda, Vol. 3 No. 3.

<sup>2</sup> Panjaitan. (2013) "*Pengaruh Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat*." Jurnal Rajawali Press, hal.134.

<sup>3</sup> Anna Margret et al., *Menyoal Data Representasi Perempuan Di Lima Ranah*, 2018, hal

platform yang kuat kepada partai politik yang ikut serta dalam pemilu untuk fokus pada pentingnya keterwakilan perempuan minimal 30% pada pengajuan calon anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)<sup>4</sup>.

Tingkat pendidikan di suatu daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap angka representasi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pendidikan yang lebih tinggi cenderung meningkatkan kesadaran politik perempuan, memperkuat kapasitas mereka dalam memahami proses legislatif, dan meningkatkan kepercayaan diri untuk terlibat dalam politik. Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan dapat membatasi akses perempuan terhadap informasi politik dan mengurangi partisipasi mereka dalam proses demokrasi.

Menurut hasil penelitian dari Rokhmah dan Nugroho pada tahun 2011, perempuan dengan pendidikan tinggi memiliki kecenderungan lebih besar untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan memiliki ambisi menjadi pemimpin publik. Oleh karena itu, di daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, terutama pada perempuan, angka representasi perempuan di lembaga legislatif cenderung lebih tinggi.<sup>5</sup>

Menurut data BPS kota Jambi rata-rata tingkat Pendidikan perempuan di kota Jambi berkisar 10-10,5 tahun masa Pendidikan yang di tempuh, dan jumlah penduduk perempuan di kota Jambi tercatat pada tahun 2024 sebanyak 315.705 jiwa, berdasarkan jumlah persentase Pendidikan dan juga angka penduduk

---

<sup>4</sup>[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

<sup>5</sup>Rokhmah, R., & Nugroho, H. (2011). *Pendidikan dan Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 25(2), hal 145–160.

perempuan kota Jambi yang seperti di sajikan tersebut representasi perempuan di DPRD kota Jambi periode 2024-2029 hanya sebesar 15,56% atau dalam jumlah angka hanya 7 orang

Indonesia memiliki 18% perempuan yang menjadi anggota legislatif di DPR saat ini. Suatu kemajuan yang dihasilkan dari gerakan yang menuntut praktik demokrasi elektoral kita untuk menerapkan politik afirmatif terhadap perempuan. Satu aspek politik perempuan yang penting untuk diperhatikan dan diperjuangkan untuk perbaikan adalah keterwakilan di lembaga politik. Meskipun demikian, keberhasilan perjuangan politik perempuan tidak terbatas pada keterwakilan. Keterlibatan perempuan dalam proses politik, terutama dalam pembuatan kebijakan publik, sangat rendah.<sup>6</sup>

Sebagai bentuk antisipasi dari minimnya partisipasi keterwakilan dari perempuan maka solusi yang dianggap efektif adalah dengan menerapkan *affirmative action* yang merupakan suatu bentuk diskriminatif positif.<sup>7</sup> Kebijakan *affirmative action* sudah diimplementasikan di Indonesia, yaitu partai politik harus mencalonkan paling sedikit 30% perempuan untuk menjadi calon anggota legislatif, dan memasukkan paling sedikit satu caleg perempuan dari tiga nama pada daftar calon.

Dalam perspektif teori kritikal, angka 30% bukan sekadar "kuota", tetapi merupakan batas minimum yang memungkinkan perempuan benar-benar punya suara politik. Jika jumlah perempuan terlalu kecil (misalnya hanya 5–10%), mereka

---

<sup>6</sup> Soeseno Nuri Dkk. (2011) "*Perempuan Dan Politik*." Jurnal Studi Politik, : Vol L, hal.2

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 59

cenderung dipinggirkan secara simbolik, tidak dianggap sebagai kekuatan kolektif, dan suara mereka sering kali tidak berpengaruh dalam pengambilan kebijakan.

Angka 30% ini didasarkan pada teori “*critical mass*” dalam studi representasi politik, yang menyatakan bahwa ketika perempuan mencapai setidaknya sepertiga dari anggota parlemen, maka mereka mulai mampu membentuk koalisi, memengaruhi agenda politik, dan menyuarakan kepentingan gender secara efektif. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran teori kritikal untuk menciptakan perubahan sosial yang substantif, kelompok yang termarjinalkan harus mencapai tingkat representasi yang cukup untuk melawan struktur dominan.<sup>8</sup>

Perempuan kini memiliki lebih banyak kesempatan untuk terlibat dalam politik berkat struktur ini. Namun pada kenyataannya, bukan hal yang aneh jika 30% yang ditemukan tidak terpenuhi. Pendidikan politik yang belum diberikan secara umum menjadi penyebab permasalahan tersebut, oleh sebab itu pola pemikiran perempuan belum terbuka akan hal tersebut.

---

<sup>8</sup> Dahlerup, Drude. (1988). *From a Small to a Large Minority: Women in Scandinavian Politics*. *Scandinavian Political Studies*, 11(4), hal 275–298.

**Tabel 1.1 Daftar Calon Sementara dari partai politik Yang diserahkan partai politik dan ditetapkan oleh KPU kota Jambi menjelang pemilu DPRD kota Jambi 2024.**

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH CALON	AFFIRMATIVE ACTION PEREMPUAN
1	PPP	27	56%
2	HANURA	27	41%
3	PKN	44	39%
4	PKS	45	38%
5	PKB	41	38%
6	PDIP	45	36%
7	NASDEM	45	36%
8	PSI	45	36%
9	UMMAT	26	35%
10	GELORA INDONESIA	32	34%
11	BURUH	15	33%
12	GERINDRA	45	33%
13	PAN	45	33%
14	PERINDO	45	33%
15	PPP	27	32%
16	DEMOKRAT	45	31%
17	GOLKAR	35	29%

Sumber: KPU Kota Jambi<sup>9</sup>

Dari table tersebut kita dapat melihat berapa persen jumlah *affirmative action* Perempuan DCS dari masing masing partai politik yang di tetapkan KPU kota Jambi menjelang pemilu 2024, di tabel tersebut juga dapat kita melihat bahwa hampir semua partai politik peserta pemilu DPRD Kota Jambi tahun 2024 telah memenuhi ketentuan *affirmative action* Perempuan sesuai pasal 65 ayat (1) UU no 12 tahun 2003 tentang Pemilu.

” Apabila kuota 30% telah terpenuhi, tidak jarang partai politik hanya mencari kandidat dari calon perempuan hanya untuk memenuhi kuota persyaratan yang telah ditetapkan oleh lembaga penyelenggara pemilu. Kedepan, perlu adanya

---

<sup>9</sup> KPU Kota Jambi

bentuk sosialisasi baru tentang kekuasaan yang tidak selamanya bernuansa maskulin sehingga perempuan tidak harus mengeliminasi unsur-unsur feminitas dalam dirinya sendiri demi menggapai kekuasaan.”<sup>10</sup>

Diantara bentuk partisipasi nyata perempuan adalah dengan melihat keterwakilan perempuan di ranah politik dan lembaga politik secara realitas. Ternyata jumlah keterwakilan perempuan di Indonesia tergolong rendah ketimbang laki-laki.<sup>11</sup> Secara kuantitas perempuan memang lebih banyak daripada laki-laki. Namun, yang berminat untuk terjun dalam dunia politik hanya segelintir saja. Dalam lembaga legislatif, keterwakilan perempuan amat kecil. Hal ini ditunjukkan oleh data di bawah ini yang menunjukkan masih rendahnya keterwakilan perempuan di DPR RI.

**Tabel 1.2 Representasi Perempuan di DPR RI 2004-2029**

<b>Periode</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Laki-laki</b>
2004-2009	65 (11,6%)	435 (87%)
2009-2014	101 (18%)	459 (82%)
2014-2019	97 (17,3%)	463 (82,7%)
2019-2024	118 (20,5%)	457 (79,5%)
2024-2029	127 (21,9%)	453 (78,10%)

*Sumber* : Dikutip dari berbagai sumber

Berdasarkan data tabel tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa target 30% keterwakilan anggota parlemen perempuan dalam UU Pemilu masih belum tercapai. Meski belum mencapai ketentuan 30%, namun tidak dapat dipungkiri dari tabel di atas bahwa keterwakilan perempuan di DPR RI mengalami peningkatan

<sup>10</sup> Soeseno Nuri Dkk. (2011) "Perempuan Dan Politik." Jurnal Studi Politik, : Vol L, hal. 62

<sup>11</sup> Zaenal Mukarom, 2018, "Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif", Mediantor, Vol. 9, No.2.

pada periode 2024-2029, yakni naik menjadi 21% dari periode sebelumnya yang sebesar 20,5%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam politik masih jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Meskipun demikian, keputusan-keputusan yang berkaitan dengan isu-isu berbasis gender mungkin dipengaruhi oleh dominasi politik laki-laki yang kuat. Akibatnya, perempuan sangat bergantung pada laki-laki dalam politik. Partisipasi sejajar antara laki laki dan perempuan dalam kehidupan publik adalah salah satu prinsip mendasar yang diamanatkan di dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau *CEDAW*) yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada tahun 1979 dan disahkan mulai tahun 1981.<sup>12</sup>

Sementara itu, keterlibatan kaum perempuan dalam kancah politik merupakan salah satu pendukung demokrasi yang sangat potensial. Pendidikan politik dan hak politik perempuan harus menjadi prioritas utama. Pendidikan politik untuk perempuan harus mengarahkan kaum perempuan untuk menyadari pentingnya pembebasan kaum perempuan dari marginalisasi politik terhadap kaumnya. Namun, pemahaman politik kapitalis tidak boleh mengabaikan pemberdayaan politik perempuan, karena justru menempatkan perempuan di posisi yang sama dengan laki-laki dalam perebutan kekuasaan. Peran politik adalah bagian dari tanggung jawabnya terhadap masyarakat luas, sedangkan peran ibu adalah

---

<sup>12</sup> Euis Heryati, *Perempuan Di Parlemen, Forum Ilmiah Indonusa*, vol. 2, 2005, hal 11.

tanggung jawab utamanya untuk mendampingi suaminya dan mendidik anak-anaknya untuk menciptakan generasi yang baik.<sup>13</sup>

Kurangnya rasa percaya diri adalah salah satu sebab utama atas kurang terwakilinya perempuan dalam lembaga-lembaga politik formal, termasuk parlemen, pemerintahan, dan partai-partai politik. Dengan adanya kepercayaan diri dan tekad yang bulat, perempuan dapat meraih derajat tertinggi dalam proses politik. Untuk itulah mengapa perempuan harus percaya pada diri mereka sendiri dan harus membuang jauh persepsi yang berkembang luas bahwa laki-laki harus menjadi pemimpin mereka. Perempuan setara dan mempunyai potensi yang sama seperti laki-laki tetapi hanya bagi mereka yang dapat memperjuangkan hak-haknya. Perempuan adalah juru kampanye, organisatoris dan mobilisator dukungan yang sangat baik, tetapi rasa khawatir kadang-kadang menghalangi mereka untuk ikut berkompetisi dalam pemilihan dan berpartisipasi dalam kehidupan politik.<sup>14</sup>

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pasal 173 ayat (2) poin e menyebutkan bahwa partai politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan di tingkat pusat, bagi perempuan sebenarnya menjadi berita baik bagi kaum perempuan. Namun ternyata, kuota 30% perempuan di dalam keanggotaan partai politik tidak secara otomatis mengubah paradigma partai untuk berpihak kepada perempuan. Terbukti bahwa keterlibatan

---

<sup>13</sup> Soeharto, Achmad.(2011) *"Urgensi Pendidikan Politik Bagi Perempuan."* Jurnal Muwazah, : Vol.3 No. 1: hal 328-329.

<sup>14</sup> Euis Heryati, *Perempuan Di Parlemen, Forum Ilmiah Indonusa*, vol. 2, 2005, hal 34

perempuaan di dalam politik masih sangat rendah, meskipun telah ditetapkan kebijakan kuota 30%.

**Tabel 1.3 Data Hasil Penetapan Anggota DPRD kota JAMBI 2019-2029**

Periode	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
2019-2024	37 orang (82,22%)	8 orang (17,78%)	45 orang
2024-2029	38 orang (84,44%)	7 orang (15,56%)	45 orang

(Sumber : <https://jambi.bps.go.id>)<sup>15</sup>

**Tabel 1.4 Daftar Anggota DPRD Perempuan kota Jambi Periode 2024  
2029**

NO	NAMA	Partai Politik	Daerah Pemilihan	Jumlah Suara	Jabatan
1	Syofni Herawati	PKB	Kota Jambi 1	3.660	Anggota
2	MariaMagdalena	PDIP	Kota Jambi 2	1.794	Anggota
3	Hj.Hendriani	DEMOKRAT	Kota Jambi 2	3.070	Anggota
4	Dyah Kumala Dewi	GOLKAR	Kota Jambi 3	4.275	Anggota
5	Menmo Eka Desthya	PAN	Kota Jambi 3	2.656	Anggota
6	Riza Delviarista	NASDEM	Kota Jambi 4	3.588	Anggota
7	Nully KurniasihKawuri	DEMOKRAT	Kota Jambi 5	4.207	Anggota

(Sumber: [jdih.kpu.go.id](http://jdih.kpu.go.id))<sup>16</sup>

Tabel tersebut mencatat jumlah keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Jambi 2019-2024 dan 2024-2029. Berdasarkan informasi tersebut, terlihat bahwa jumlah Perempuan dalam DPRD kota Jambi masih rendah, belum mencapai target minimum Perempuan di Lembaga legislatif, pada periode 2024-2029 hanya sekitar 15,56% atau 7 anggota dari 45 kursi, yang menunjukkan penurunan dari periode

<sup>15</sup> <https://jambi.bps.go.id>

<sup>16</sup> [jdih.kpu.go.id](http://jdih.kpu.go.id)

sebelumnya, pada periode sebelumnya sebesar 17,78% tahun 2019-2024 atau 8 anggota dari 45 kursi . Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan Perempuan di DPRD kota Jambi masih belum optimal dalam pemenuhan kuota 30% Perempuan di legislatif.

Urgensi dalam penelitian ini yaitu adanya suatu indikator awal untuk menilai perilaku pemilih masyarakat Kota Jambi terhadap Keterwakilan Perempuan di DPRD kota Jambi periode 2024-2029. Sebagai kontribusi untuk membentuk dan meningkatkan kualitas partisipasi politik perempuan, sebagai referensi untuk membangun pemahaman Masyarakat yang berimplikasi kepada tingkat representasi perempuan pada DPRD di Kota Jambi.

Pendidikan politik memiliki peran penting bagi individu karena berusaha mengubah pemahaman, sikap, dan perilaku politik mereka. Ini berarti bahwa melalui pendidikan politik, seseorang tidak hanya akan memperoleh pengetahuan tentang politik, tetapi juga akan mengembangkan kesadaran dan perasaan yang memungkinkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik atau menunjukkan perilaku politik yang mendukung tujuan politik yang diinginkannya.

Berikut penelitian terdahulu yang menjadi bahan referensi peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu pertama, *Tri Damayanti* tahun 2021 yang berjudul "Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Politik Aceh (Studi Kasus: Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan di DPRA pada Tahun 2019-2024)".<sup>17</sup> Hasil penelitian menunjukkan, keterwakilan perempuan di Aceh dalam lembaga politik

---

<sup>17</sup> Tri Damayanti, "*Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Politik Aceh (Studi Kasus: Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan di DPRA pada Tahun 2019-2024)*", Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2021.

masih sangat rendah dan sangat jarang. Khususnya kesadaran masyarakat kaum perempuan untuk bergabung di lembaga politik juga masih sangat minim dikarenakan pola pemikiran masyarakat yang masih sangat kental dengan budaya dan, yang dimana laki-laki lebih penting dari pada Perempuan. Sehingga, masyarakat masih beranggapan bahwa urusan politik dan kepemimpinan laki-laki lebih pantas dibandingkan dengan perempuan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada lokasi penelitian, dan tahun penelitian. Persamaannya yakni memiliki pembahasan yang sama yakni tentang keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif.

Kedua, Penelitian yang di lakukan oleh *Fatimah Azzahra Kaloko*, yang berjudul “Representasi Perempuan dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Dairi Periode 2019-2024” Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Dairi periode 2019-2024 yang hanya sebesar 5,7%, dipengaruhi oleh beberapa faktor: budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai dominan dalam politik, keterbatasan ekonomi perempuan untuk bersaing, rendahnya akses pendidikan bagi perempuan, serta kurangnya dukungan dari partai politik. Untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, partai politik perlu merekrut kandidat perempuan berkualitas, mendukung mereka, memberikan pelatihan, serta berkomitmen penuh untuk mencapai tujuan ini.<sup>18</sup>

Perbedaan antara penelitian berjudul “Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Dairi Periode 2019-2024” dengan penelitian yang akan peneliti lakukan

---

<sup>18</sup> *Fatimah Azzahra Kaloko, “Presentasi Perempuan dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Dairi Periode 2019-2024”*

yakni yang berjudul “Analisis Representasi Perempuan dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Jambi Periode 2024-2029” terletak pada fokus konteks, waktu, dan ruang lingkup.

Jika dilihat dari kedua penjabaran penelitian terdahulu maka disimpulkan bahwa angka keterwakilan Perempuan masih rendah dan juga tingkat ketertarikan perempuan untuk terjun kedalam parlemen di Indonesia masih kurang khususnya di daerah yang masih memegang teguh adat istiadat dan pedoman agama yang masih sangat kuat.

Berdasarkan uraian pemaparan tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian di DPRD kota Jambi yang berjudul **”ANALISIS REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF KOTA JAMBI PERIODE 2024-2029”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini “Bagaimana Representasi Perempuan dalam pemilihan anggota Legislatif Kota Jambi periode 2024-2029?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian peneliti lakukan yakni untuk mengetahui bagaimana representasi perempuan di Legislatif kota Jambi periode 2024-2029.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam Penelitian ini adalah:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Selain sebagai bahan kajian perbandingan kedepannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dalam penyelesaian kajian-kajian yang menghasilkan solusi terhadap representasi perempuan khususnya pada pemilihan anggota legislatif Kota Jambi masa jabatan 2024–2029.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diinginkan mampu memberikan wawasan penting bagi pembaca mengenai peran dan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan politik, yang dapat mendorong peningkatan partisipasi Perempuan di DPRD kota Jambi supaya pengembangan kebijakan dapat lebih inklusif serta responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

### **1.5. Landasan Teori**

#### **1.5.1 Teori Representasi Perempuan**

Representasi merupakan Hubungan antara seorang wakil dan rakyat yang diwakilinya, yang dilandasi oleh kepentingan kedua belah pihak dalam suatu lingkungan politik tertentu, disebut dengan keterwakilan atau keterwakilan politik. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan dan akuntabilitas yang dimiliki seorang wakil kepada masyarakat yang diwakilinya merupakan komponen fundamental dari sistem representasi. Konsep representasi tidak diragukan lagi penting dalam wacana demokrasi. Kualitas demokrasi dapat dinilai dengan menggunakan area representasi ini.

Tujuan transisi menuju demokrasi yang lebih substantif tentu dapat dicapai setelah lanskap keterwakilan ditingkatkan.

Sebuah sistem keterwakilan yang dapat memastikan keikutsertaan semua kelompok berkepentingan, khususnya kelompok yang terpinggirkan secara politik, seperti perempuan, sangatlah diharapkan. Terbukanya peluang yang setara tidak selalu menjamin bahwa kepentingan perempuan terwakili secara penuh dan efektif karena mereka adalah kelompok yang kehilangan haknya.

Perempuan konseptualisasi representasi yang dibuat oleh Hanna F. Pitkin dalam bukunya yang berjudul "*The Concept of Representation*". Dalam konsepsi Pitkin, representasi dibedakan dalam empat kategori:

- a) Representasi formal (*formalistic representation*), Representasi formal dipahami sebagai perwakilan politik yang berlangsung di dalam lembaga-lembaga perwakilan formal, seperti parlemen dimana seorang dipilih melalui mekanisme pemilu untuk menduduki posisi sebagai wakil rakyat dalam Lembaga perwakilan.<sup>19</sup>
- b) Representasi deskriptif (*descriptive representation*), representasi deskriptif dipahami sebagai bentuk representasi dimana seorang wakil berdiri untuk (*stands for*) orang-orang yang secara objektif serupa, dipahami sebagai kesamaan deskriptif antara wakil

---

<sup>19</sup>Hanna F. Pitkin, *The Concept of Representation*, Berkeley: University of California Press, 1967, hal 48

dengan yang di wakili konsep ini mengacu pada situasi dimana seorang wakil atau anggota legislative memiliki karakteristik atau identitas yang sama dengan kelompok masyarakat yang diwakilinya.<sup>20</sup>

- c) Representasi simbolik (*symbolic representation*), jika wakil berdiri untuk (*standing for*) representasi ini dipaham dimana mereka yang mewakili tidak harus didasarkan pada Tindakan nyata, melainkan berfokus pada bagaimana seorang wakil dapat “berdiri untuk” orang orang yang diwakilinya melalui simbol, citra, atau tanda tanda yang membangkitkan rasa keterwakilan, pengakuan, atau identitas kolektif dalam benak publik.<sup>21</sup>
- d) Representasi substantif (*substantive representation*), Representasi substantif dipahami sebagai model representasi dimana seorang wakil bertindak untuk (*acts for*) mereka yang diwakili.<sup>22</sup>

Konsep representasi politik itu mengandung dua dimensi penting, yakni dimensi di mana wakil tersebut berdiri untuk (*stands for*) dan bertindak untuk (*acts for*) mereka yang diwakili. Kedua dimensi ini merupakan satu kesatuan. Artinya, seorang Anggota legislatif perempuan tidak dinilai hanya dari dia berdiri mewakili kelompok tertentu, melainkan juga bagaimana dia bertindak untuk memperjuangkan urusan-urusan publik (*public affairs*)

---

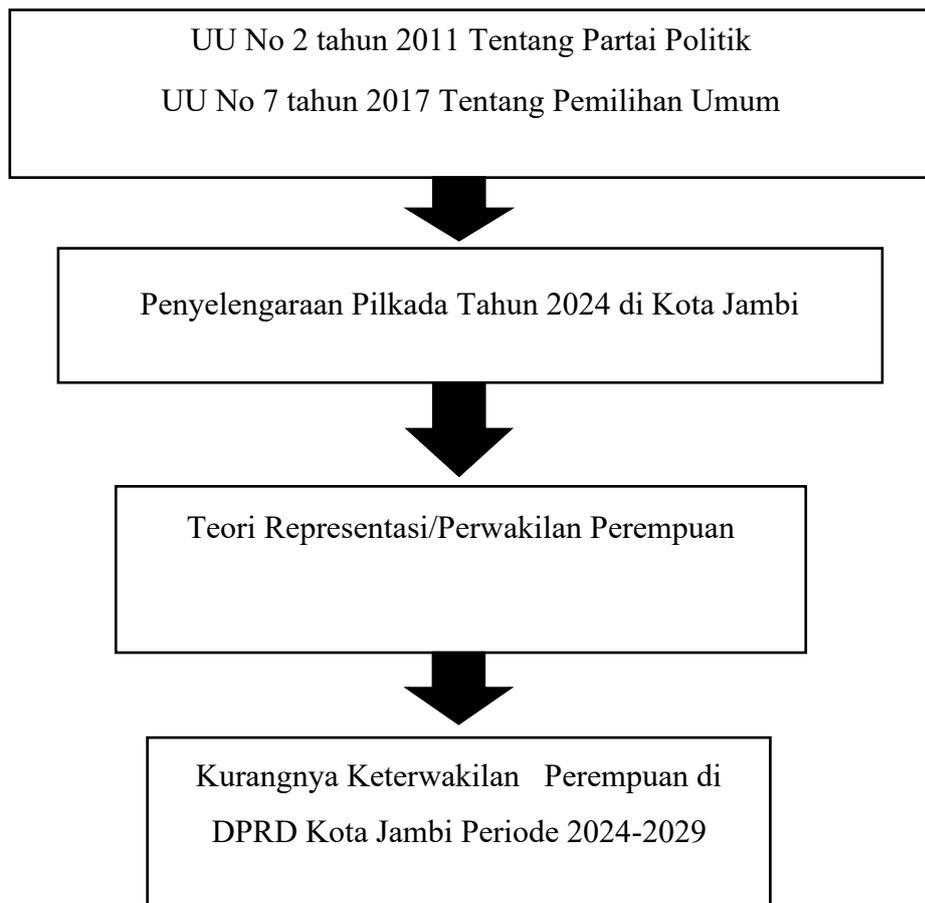
<sup>20</sup> *Ibid*, hal 73

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 122

<sup>22</sup> *ibid*, hal 148

pada umumnya. Meskipun demikian, kriteria utamanya adalah fokus mereka pada organisasi perempuan. Selama tidak mengabaikan kelompok perempuan, mereka bisa mewakili kepentingan kelompok mana pun.

### 1.6.Kerangka Berpikir



(Gambar 1.1 kerangka pikir).

Berlandaskan kerangka pikir diatas terkait representasi Perempuan dalam pemilihan anggota DPRD kota Jambi periode 2024-2029 yakni peneliti bertujuan akan melaksanakan penelitian terkait keterwakilan Perempuan dalam pemilihan anggota DPRD kota Jambi periode 2024-2029

## 1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data untuk aplikasi tertentu. Kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan landasan ilmiah merupakan pendekatan ilmiah yang dimaksud. Landasan ilmiah yang diselidiki adalah logis, empiris, dan metodis.

Upaya penelitian ini rasional jika dilakukan dengan cara yang sesuai dengan logika manusia. Empiris mengacu pada fakta bahwa manusia dapat menyaksikan teknik yang digunakan, memungkinkan orang lain untuk memeriksa dan mempelajarinya. Sistematis mengacu pada penerapan tahapan logistik tertentu dalam proses penelitian.

### 1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Metode penelitian kualitatif ini sering disebut juga metode naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*).<sup>23</sup> Dan untuk menyajikan data dalam bentuk deskriptif, peneliti menggambarkan secara jelas terkait permasalahan yang diteliti.

### 1.7.2 Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Kota Jambi. Dalam hal ini, penelitian ini dilakukan di Daerah kerja anggota DPRD kota jambi. Mengenai penetapan tempat penelitian ini, Peneliti ingin mendapatkan hasil yang objektif

---

<sup>23</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)," *Metode Penelitian Kualitatif*, 2023, 1–274, <http://belajarsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/.hal.104>.

serta akurat tentang Representasi Perempuan dalam pemilihan anggota DPRD Kota Jambi Tahun 2024-2029.

### **1.7.3 Fokus Penelitian**

Berlandaskan latar belakang yang penulis jabarkan, penelitian ini berfokus pada Representasi Perempuan dalam pemilihan anggota DPRD Kota Jambi periode 2024-2029. Untuk itu peneliti memfokuskan penelitian ini untuk melihat bagaimana Representasi perempuan di DPRD kota Jambi periode 2024-2029

### **1.7.4 Sumber Data**

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari sumber asli atau data yang langsung diberikan kepada pengumpul data.<sup>24</sup> Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian. Singkatnya, data primer merupakan semua data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.
2. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.<sup>25</sup> Peneliti dapat memperoleh data sekunder dengan menggunakan sumber perantara, mengutip dari sumber lain berupa buku, skripsi, jurnal, dan informasi pendukung yang penulis

---

<sup>24</sup> *Ibid*,hal.104.

<sup>25</sup> *Ibid*,hal.104.

kumpulkan dari sumber informasi dan kemudian dikumpulkan selama proses penelitian.

### 1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling* (Sampel Bertujuan). Teknik Purposive Sampling merupakan teknik pemilihan sumber data dengan tujuan dan pertimbangan tertentu.<sup>26</sup> Metode pemilihan informan ini mempertimbangkan faktor-faktor individu yang relevan dengan subjek penelitian. Subjek atau objek dipilih oleh peneliti sebagai unit analisis. Berdasarkan kebutuhan peneliti, peneliti memilih unit analisis, yang diyakini dapat mewakili.

**Tabel 5. Informan Penelitian**

No	Informan	Jabatan
1	Empat orang anggota DPRD kota Jambi Perempuan Terpilih periode 2024-2029	Anggota DPRD kota Jambi Perempuan terpilih periode 2024-2029
2	Tiga orang Kader partai DPC/DPD kota Jambi yang memiliki perwakilan perempuan terpilih di DPRD kota Jambi	Kader DPC/DPD Partai Demokrat kota Jambi, Kader DPC/DPD partai PDIP kota Jambi, Kader DPC/DPD partai Golkar kota Jambi.
3	Satu orang Pengamat politik di Kota Jambi	Pengamat politik
4	Satu orang Aktifis Perempuan di kota Jambi	Aktifis Perempuan Kota Jambi
5	Dua orang Masyarakat perempuan kota Jambi	Masyarakat Kota Jambi

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal.24

### 1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah:

#### 1. Wawancara

wawancara mendalam (*in depth interview*) Wawancara mendalam penulis pilih karena dalam pelaksanaannya lebih bebas untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, pihak yang menjadi subjek atau objek yang diajak wawancara oleh penulis dapat diminta pendapat, pengamatan, dan penjelasan secara mendalam mengenai masalah yang akan diteliti.<sup>28</sup>

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mengkaji dan mengolah data dari dokumen dokumen yang sudah ada sebelumnya dan mendukung data penelitian. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik( misalnya koran, makalah, dan lainnya) ataupun dokumen privat misalnya ,buku harian, surat, email,). Sumber data dan dokumen pada penelitian diperoleh dari pengamatan, jurnal penelitian terdahulu, website, dan buku buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, serta artikel dari sumber terpercaya.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal.104.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal.115.

### 1.7.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus mengakibatkan variasi data tinggi sekali.<sup>29</sup> Untuk itu perlu adanya sebuah teknik untuk menganalisis data tersebut. Pada penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik analisis data yakni reduksi data, penyajian data dan konklusi atau penarikan Kesimpulan.

#### 1. Reduksi data

“Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu diperlukan dicatat secara teliti dan rinci”. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan.<sup>30</sup>

#### 2. Penyajian data,

Setelah proses data di reduksi, maka langkah berikutnya adalah menyajikan data. Data temuan dilapangan dianalisis dan disajikan dalam bentuk uraian singkat atau teks naratif, bagan, *flowchart*, gambar dan sebagainya. Dalam hal ini Miles dan Huberman yang paling sering

---

<sup>29</sup> *Ibid*,hal.129

<sup>30</sup> *Ibid*,hal.134-135

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya disarankan dalam melakukan display data, selain teks yang naratif juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jaringan kerja) dan *chart*.<sup>31</sup>

### 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>32</sup>

#### 1.7.8 Keabsahan Data/Triangulasi

Dalam penelitian, keabsahan data juga sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya. Keabsahan data adalah suatu konsep yang mengacu pada sejauh mana data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian dapat dipercaya dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian ini, terdapat dua triangulasi data diantaranya :

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal.137-138

<sup>32</sup> *Ibid*, hal.141-142

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dari sumber yang berbeda beda dengan dengan tehnik yang sama.<sup>33</sup>

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi tehnik adalah tehnik pengumpulan data yang digunakan peneliti berbeda beda untuk memperoleh data dari sumber yang sama.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*,hal.125

<sup>34</sup> *Ibid*,hal.125